

# Analisis Sengketa Pertikaian Antara Rusia Dan Ukraina

Rosinta Paulina Br. Simatupang<sup>a,\*</sup>, Victor Tongam Museka Siregar<sup>b</sup>, Lenny Husna<sup>c</sup>

<sup>abc</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, Batam

\*paulinarosinta95@gmail.com

## Abstract

Ukraine's entry into NATO has sparked conflict, shaken global politics and international markets, and brought new challenges to international relations. The impact is predicted to be felt in the long term across the world economy, as explained in Champbell's causality theory. The Russian invasion of Ukraine on 24 February 2022 became a global event of widespread impact, raising internal political tensions in Ukraine and Russia. In Ukraine, political polarization has occurred between NATO supporters and pro-Russia, with the government imposing sanctions on Russian supporters. In Russia, freedom of expression is restricted, and cyber attacks on Ukrainian infrastructure, deepening the dimension of the conflict. The economic impact is severe, with Ukraine undergoing international isolation and Russia facing economic sanctions as well as falling oil prices as a result of a boycott of imports from the United States and its allies. Food deficits also occurred in some regions due to dependence on imports of wheat and oil from Russia and Ukraine. Efforts to resolve the conflict have been made, such as a UN resolution calling for an end to Russian attacks on Ukraine as well as diplomatic efforts by various countries and international organizations, including Indonesia, Turkey, and France. Thus, although the conflict continues, hope lies in diplomatic efforts to bring peace and stability back to the region. The advice that can be given is the need for intensive diplomatic efforts and global coordination to alleviate tensions and mitigate the negative economic impact. The protection of human rights and the principles of international law must also be the focus in responding to this conflict. With a holistic approach and inter-state cooperation, it is expected that the conflict can be resolved peacefully and provide long-term stability for the region and the world.

**Keywords:** Analisis; NATO; Effort

## Abstrak

Bergabungnya Ukraina ke dalam NATO telah memicu konflik, mengguncang politik global dan pasar internasional serta membawa tantangan baru dalam hubungan internasional. Dampaknya diprediksi akan terasa dalam jangka panjang di seluruh ekonomi dunia, sebagaimana dijelaskan dalam teori kausalitas menurut Champbell. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 menjadi peristiwa global yang berdampak luas, menimbulkan ketegangan politik internal di Ukraina dan Rusia. Di Ukraina, polarisasi politik antara pendukung NATO dan pro-Rusia telah terjadi, dengan pemerintah memberlakukan sanksi terhadap pendukung Rusia. Di Rusia, kebebasan berpendapat dibatasi, dan terjadi serangan cyber terhadap infrastruktur Ukraina, memperdalam dimensi konflik. Dampak ekonominya sangat terasa, dengan Ukraina mengalami isolasi internasional dan Rusia menghadapi sanksi ekonomi serta penurunan harga minyak akibat boikot impor dari Amerika dan sekutunya. Defisit pangan juga terjadi di beberapa wilayah akibat ketergantungan pada impor gandum dan minyak dari Rusia dan Ukraina. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan, seperti resolusi PBB yang menuntut penghentian serangan Rusia terhadap Ukraina serta upaya diplomasi dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Indonesia, Turki, dan Prancis. Dengan demikian, meskipun konflik ini masih berlanjut, harapan ada pada upaya diplomasi untuk membawa perdamaian dan stabilitas kembali ke kawasan tersebut. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya upaya diplomasi intensif dan koordinasi global untuk meredakan ketegangan dan mengurangi dampak ekonomi negatif. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip hukum internasional juga harus menjadi fokus dalam menanggapi konflik ini. Dengan pendekatan holistik dan kerja sama antarnegara, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan dengan damai dan memberikan stabilitas jangka panjang bagi kawasan dan dunia.

**Kata Kunci:** Analisis; NATO; Upaya

## 1. Pendahuluan

Presiden Federasi Rusia telah mengumumkan aksi militer terhadap Ukraina.

Serangan dimulai dengan fokus pada wilayah Donsbas dan Luhansk, sambil mencoba menembus Ibukota Kyiv, yang merupakan

pusat pemerintahan Ukraina. Tindakan perang ini dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 atas perintah langsung dari Presiden Rusia, yang menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi kedaulatan dan harga diri Rusia. Alasannya adalah kekhawatiran bahwa Ukraina berupaya untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, sehingga dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Rusia (Nadia Maulidatul Qudsiyah, Pinastika Prajna Paramita 2023). Rusia dan Ukraina sebelumnya merupakan bagian dari Uni Soviet yang pecah pada tahun 1991 karena masalah internal dan kekalahan dalam Perang Dingin. Uni Soviet dan negara-negara satelitnya merupakan bagian dari Blok Timur dalam politik global pada masa itu. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia memulai pembentukan sebuah aliansi pertahanan yang bertujuan untuk menandingi NATO, yang dikenal sebagai *Commonwealth of Independent States (CIS)*. Ukraina awalnya menjadi anggota CIS secara tidak tetap. Namun, Ukraina kemudian keluar dari aliansi tersebut setelah Rusia melakukan invasi ke Crimea pada tahun 2014. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina semakin memanas ketika Volodymyr Zelensky terpilih sebagai Presiden Ukraina pada tahun 2019. Zelensky cenderung memiliki kecenderungan pro-Barat dan menentang keinginan Rusia untuk menjaga Ukraina tetap netral. Dia secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap keanggotaan Ukraina di NATO dan Uni Eropa, yang menimbulkan ketidakpuasan Rusia sebagai pemimpin Blok Timur. Konflik antara kedua negara semakin memburuk dan akhirnya memuncak dalam perang pada tahun 2022 (Gunadi 2014).

Dalam menyelesaikan konflik, prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi pedoman. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menekankan pentingnya menggunakan cara-cara damai seperti negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui lembaga atau pengaturan regional, sebelum mempertimbangkan langkah-langkah hukum. Dalam konteks konflik antara Rusia dan Ukraina, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 33 Piagam PBB karena belum adanya upaya diplomasi yang cukup dan pernyataan langsung dari Rusia tentang perang terhadap Ukraina. Selain itu, tindakan Rusia juga bertentangan dengan Memorandum Konvensi Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) tahun 1994, yang menegaskan penghormatan terhadap batas-batas kedaulatan Ukraina yang telah disepakati dalam sebuah memorandum. Dalam konvensi tersebut, Ukraina menyerahkan senjata

nuklirnya kepada Rusia dengan mediator dari PBB, Inggris, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, langkah-langkah diplomasi dan penyelesaian damai seharusnya diprioritaskan sebelum langkah hukum diambil, sesuai dengan prinsip-prinsip PBB yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, harmoni, dan perdamaian dunia (FARHAN 2024).

## 2. Kajian Literatur

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dalam penulisan ini, tulisan yang digunakan mengacu pada teori-teori ilmiah dan pandangan para ahli dalam bidang yang relevan, untuk merancang pembahasan serta menemukan solusi terhadap masalah yang dibahas. Dengan demikian penulis menggunakan dua teori yaitu teori kausalitas dan teori resolusi konflik, teori kausalitas ialah terkait hubungan sebab dan akibat menurut Champbell teori kausalitas ini dapat membantu kita dalam mengidentifikasi hubungan antara dua studi kasus, yaitu Konflik Rusia Ukraina dan Konflik Internal NATO. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa Konflik Rusia Ukraina dan Konflik Internal NATO berpotensi memunculkan konflik baru. Namun, jenis konflik yang dimaksud belum spesifik dan strategi untuk mencegahnya masih belum jelas. (CNBC, 2022a; European Parliament, 2022; Jenkins, 2023) dalam (Latupeirissa et al. 2023) Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan didukung oleh teori resolusi konflik dari perspektif Lederach Untuk menghadapi ketakutan yang di atas, sangat penting untuk berusaha menyelesaikan konflik. Ketakutan tersebut mengacu pada prediksi munculnya konflik baru melalui teori Lederach, sehingga penyelesaian konflik ini juga akan mengikuti teori resolusi konflik dari perspektif Lederach (Lederach, 1997) dalam (Latupeirissa et al. 2023)

Pada penelitian sebelumnya membahas tentang terpilihnya Volodymyr Zelensky sebagai presiden Ukraina yang sebagaimana ia ditakuti Rusia akibat sikap Zelensky yang condong terhadap NATO, seperti yang diteliti dalam Jurnal Sosial Politik Vol 8 No. 2 (2022) dengan judul “Intervensi Politik dan Militer Rusia Terhadap Ukraina Sebagai Wujud Penerapan Strategi Deterens” yang menjelaskan sistem deterens yaitu Rusia khawatir terpilihnya Zelensky karna pidato pertamanya yang menyatakan dunia membutuhkan lembaga untuk menyelesaikan konflik yang ada di dunia, Pidato Zelensky dianggap Rusia mendukung gerakan NATO sebagaimana dipelopori oleh Amerika, maka Rusia berupaya melakukan intervensi agar kekhawatirannya akan Ukraina yang condong terhadap faksi NATO (Amal et al. 2022).

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan metode kajian literatur yang bersifat menyeluruh untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan merangkum literatur yang berkaitan dengan sengketa pertikaian antara Rusia dan Ukraina. Langkah pertama akan melibatkan identifikasi literatur yang relevan, termasuk piagam PBB, regulasi internasional, studi hukum, dan kontribusi akademis yang terkait dengan aspek hukum. Evaluasi kualitas dan relevansi literatur yang teridentifikasi juga akan dilakukan untuk memastikan inklusi yang tepat dalam penelitian ini. Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui literatur-literatur terpilih, yang mencakup artikel ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi terkait lainnya.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Krisis politik dimulai ketika NATO berusaha memperluas keanggotaannya di Eropa Timur, dengan mengajak Ukraina bergabung. Rusia melihat ini sebagai ancaman dan tindakan agresi. Sebagai respons, Presiden Putin mengambil langkah untuk menduduki Krimea pada tahun 2014, yang merupakan pelanggaran serius terhadap integritas wilayah Ukraina. Ukraina tidak memiliki kekuatan untuk melawan Rusia, dan Krimea, dengan sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia, memiliki sejarah panjang yang terkait dengan Rusia. Sebelumnya, Krimea menjadi bagian dari Rusia sebelum dikuasai oleh Uni Soviet dan kemudian diberikan kepada Ukraina pada tahun 1954 oleh Nikita Khrushchev, seorang pemimpin Soviet asal Ukraina. Pendudukan Rusia atas Krimea mendapat kecaman internasional, tetapi Rusia sendiri mempertahankan tindakan tersebut sebagai pengembalian wilayah yang seharusnya menjadi bagian darinya. Aksi agresif Rusia di Krimea meningkatkan kekhawatiran Ukraina terhadap wilayah Donbas yang berbatasan dengan Rusia. Ukraina terus mendorong untuk bergabung dengan NATO, namun beberapa negara NATO, termasuk Amerika Serikat, tampaknya tidak akan menyetujuinya. Ini membuat Putin memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan Ukraina dengan NATO sendiri. Rusia percaya bahwa untuk hidup berdampingan dengan Barat, negara-negara bekas Pakta Warsawa dan bekas republik Soviet seharusnya tidak bergabung dengan NATO. Dokumen menunjukkan bahwa NATO telah berjanji pada tahun 1991 untuk tidak memperluas ke timur ke perbatasan Rusia. Namun, beberapa negara bekas Pakta Warsawa dan bekas republik Soviet akhirnya diterima oleh NATO, menimbulkan kekhawatiran akan ekspansi NATO di dekat perbatasan Rusia. Rusia merasa terkepung oleh ekspansi NATO, yang dianggap sebagai

sinyal bahwa Rusia masih dianggap sebagai ancaman oleh Barat. Bergabungnya Ukraina kedalam NATO yang menimbulkan konflik antara Rusia dan Ukraina telah menggoyang politik global dan pasar internasional, membawa tantangan baru dalam hubungan internasional. Dampaknya diperkirakan akan terasa dalam jangka panjang di seluruh ekonomi dunia, seperti yang ada dalam teori kausalitas menurut Champbell. Invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 merupakan peristiwa global yang berdampak luas. Dalam hal ini penulis konsen terhadap isu hukum berupa dampak politik dan ekonomi serta penyelesaian dari konflik tersebut.

#### 4.1 Dampak Bergabungnya Ukraina kedalam NATO

Dalam konflik tersebut mempengaruhi politik, baik dari negara Ukraina sendiri dan Rusia bahkan terhadap negara sekutu atau hubungan diplomatik terhadap negara lain: a) di Ukraina sendiri ada beberapa paham atau masyarakat yang mendukung gerakan Rusia karena 70% masyarakat di Ukraina ialah ber etnis pecahan dari Rusia sedangkan 30% nya asli dari kota qf di Ukraina sendiri situasi politik sangat panas satu sisi pemerintah Ukraina yang condong terhadap NATO memberikan sanksi-sanksi sosial maupun sanksi administrasi terhadap pendukung pendukung Rusia atau condong terhadap Faksi Rusia. b) di Rusia politik pun memanas kebebasan berpendapat dan berbicara di dalam berusia sendiri dibatasi dengan tiga gagasan yang pertama satu di kurikulum Rusia sendiri mereka tidak menyebutnya perang tapi operasi khusus untuk menyatukan Ukraina dan Rusia yang kedua dilarangnya untuk berunjuk rasa atau demo di jalanan dengan atap ini gerakan perdamaian yang ketiga membatasi semua jaringan baik media sosial untuk membahas tentang Rusia Ukraina, (Chandra and Widiatedja 2023) c) Dimensi konflik antara Rusia dan Ukraina tidak hanya terjadi melalui serangan bersenjata, tetapi juga melalui serangan cyberattack terhadap infrastruktur komputer di Ukraina. Ketika Rusia menduduki wilayah Crimea, dilaporkan terjadi serangkaian serangan cyberattack terhadap situs web surat kabar Ukraina, terutama yang mendukung gerakan Euromadian. Kelompok peretas yang diduga terhubung dengan Rusia, seperti "CyberBerkut," melakukan serangan terhadap server Komisi Pemilihan Umum Ukraina dengan menanamkan malware. Serangan ini bertujuan untuk mengubah hasil perhitungan suara sementara yang mendukung calon presiden yang bersimpati pada Rusia. Namun, upaya ini berhasil diatasi oleh respons cepat dari Ukrainian Cyber Emergency, yang berhasil membersihkan virus tersebut. Salah satu



serangan cyberattack yang paling mencolok adalah serangan terhadap perusahaan listrik regional, yang menyebabkan 225.000 pelanggan kehilangan pasokan listrik selama enam jam. Serangan ini dilakukan melalui metode spearphishing, dengan mengirimkan lampiran Microsoft Office yang berisi malware melalui email. Begitu lampiran dibuka, malware BlackEnergy secara otomatis aktif dan mengambil alih komputer tersebut. Analisis menunjukkan bahwa pelaku telah menyusup dan bersembunyi dalam sistem jaringan perusahaan selama enam bulan sebelum serangan dilakukan, melakukan pengintaian dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Kerugian yang dialami oleh penduduk sipil baik dari serangan konvensional maupun serangan cyberattack sebenarnya bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata, serta prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam konteks tersebut. Dalam upaya untuk menghumanisasi perang, hukum humaniter internasional mencakup dua prinsip fundamental: jus ad bellum (hak untuk berperang) dan jus in bello (hukum selama perang). Serangan cyberattack membuka dimensi baru dalam konflik bersenjata, baik di tingkat internasional maupun non-internasional. Namun, penerapan hukum humaniter internasional terhadap serangan cyberattack masih menjadi subjek perdebatan di beberapa negara, karena definisi dan interpretasinya belum sepenuhnya disepakati (SYARONI and Nugroho 2019). Gerakan invasi Rusia terhadap Ukraina tidak hanya mempengaruhi kawasan sekitarnya, tetapi juga menciptakan gelombang efek yang meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada ekonomi, tetapi juga merasuki domain sosial, khususnya dalam ranah media sosial seperti Twitter. Peristiwa tersebut mencetuskan beragam reaksi dan opini di antara pengguna Twitter, memperlihatkan bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina membentuk sudut pandang publik. Opini yang terungkap di Twitter secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kubu: yang mendukung Rusia dan yang mendukung Ukraina. Diskusi antara kedua kubu ini seringkali dipenuhi dengan argumen yang didasarkan pada pandangan masing-masing, dengan upaya mencari legitimasi atas posisi yang diambil. Polarisasi opini masyarakat ini mencerminkan fenomena yang lebih luas, di mana pendapat publik terbagi menjadi dua kutub yang berlawanan. Fenomena polarisasi ini bisa disebabkan oleh beragam faktor, seperti perbedaan budaya, ideologi, atau bahkan dukungan yang kuat terhadap figur politik

tertentu. Dalam polarisasi tersebut, masing-masing kelompok cenderung memandang pandangan mereka sebagai yang paling benar, sementara menganggap kelompok yang berlawanan sebagai salah, seringkali dengan dasar moralitas (Adham 2023). d) Sedangkan di luar Rusia dan Ukraina seperti Indonesia stabilitasnya sangat mempengaruhi Indonesia dengan prinsip politik bebas aktif di satu sisi Indonesia ingin memperjuangkan hak asasi manusia tetapi satu sisi menjaga perasaan Rusia akibat tidak mau terlihat condong kepada barat maupun condong terhadap poros Rusia terjadinya gejolak-gejolak politik maupun geopolitik di luar negara Rusia dan Ukraina memberikan timbul-timbul efek yang besar terhadap pandangan terhadap pandangan negara-negara lain terhadap Rusia maupun Ukraina (Hakim and Sadiyin 2022). Dari sisi ekonomi Rusia dan Ukraina sangat mengalami kemunduran akibat konflik dari sisi Ukraina beberapa paham-paham yang menyetujui Rusia mereka sangat benar benar dikucilkan di masyarakat atau Ukraina lalu di saat konflik itu Ukraina pun sudah tenggar waktu membayar obligasi di internasional sebesar 30 miliar lebih 30 miliar dollar lebih di sisi Rusia baik lembaga keuangan Rusia internasional maupun individu mengalami kerugian seperti contohnya kepemilikan saham-saham masyarakat Rusia atau warga negara Rusia di luar negeri Rusia mendapat sanksi contoh seperti Abramovic yang memiliki saham di Inggris pada klub sepak bola Inggris yaitu Chelsea ia dengan berat hati harus menerima hukuman sanksi dari Inggris untuk melepas sahamnya dan pasar-pasar saham sendiri sangat turun di luar ketika konflik ini terjadi (Agustina 2023). Lalu untuk minyak bumi saat konflik Rusia dan Ukraina Amerika mengecam Rusia dan memboikot untuk mengimpor minyak dari Rusia dan beberapa sekutu Amerika juga ikut stop atau memboikot pengiriman minyak dan gas bumi dari Rusia dari hal itu terjadilah perbandingan harga yang sangat tinggi akibat konflik tersebut diimpor-impor setelah bebas dari krisis global itu covid-19 tetapi setelah konflik ini malah menjadi merosot perekonomian dunia (Nabilla et al. 2023). Setelah minyak bumi defisit pangan juga dialami di Afrika utara dan timur tengah Afrika dan Asia Selatan dan tenggara karena Rusia dan Ukraina menyumbang 100% dari impor gandum ke Somalia lebih dari 80% ke Mesir 75% ke Sudan dan lebih dari 90% ke Laos dan sekitar 95% impor minyak bunga matahari ke Cina dan India serta lebih dari 37% impor minyak dan gas bumi ke Asia tenggara oleh sebab itu sebagian besar negara Amerika Selatan dan tengah Afrika barat dan Eropa termasuk Ukraina sendiri sangat bergantung pada Rusia untuk impor pupuk mereka

terutama kalium dengan demikian prosesnya sangat mendominasi dalam berbagai komunitas dalam ekspor gas alam untuk bahan bakar produksi pupuk nitrogen di seluruh Eropa dan Asia tenggara invasi tersebut sangat mengganggu ekonomi global berkepanjangan akibat dari pandemi covid 19 walaupun beberapa negara sudah mencoba bangkit tetapi konflik ini menunjukkan tekanan inflasi dan gangguan rantai pasokan yang besar yang diakibatkan dari krisis energi akibat konflik tersebut (Bakrie, Delanova, and Mochamad Yani 2022).

4.2 Upaya-upaya dari berbagai negara untuk meredakan konflik Ukraina dan Rusia.

Dalam teori resolusi konflik dari perspektif Lederach yang menjelaskan untuk menghadapi ketakutan yang di atas, sangat penting untuk berusaha menyelesaikan konflik, ketakutan tersebut mengacu pada prediksi munculnya konflik baru Seperti yang dijelaskan sebelumnya upaya penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina sudah dilakukan oleh beberapa negara. Pada tanggal 28 Februari 2022 majelis umum PBB yang beranggotakan 193 negara melakukan pertemuan membahas krisis di Ukraina. Mereka melakukan pemungutan suara untuk mengisolasi Rusia dengan menuntut berhenti berperang dan menarik pasukan, rancangan resolusi tersebut sudah memiliki 80 sponsor bersama dan lebih dari 100 negara akan berbicara sebelum majelis umum memberika suara resolusi sehingga menjadi harapan karena mengupayakan kenjatan senjata (Dewi Aisyah and Arlina Permanasari 2022). Dan pada tanggal 4 Maret 2022 Perserikatan Bangsa Bangsa sudah menghasilkan resolusi seperti; memprovokasi, memanfaatkan tutur terkuat serangan dari kombinasi Rusia melawan Ukraina, mendakwa gabungan Rusia agar secepatnya dan tanpa wahana mencabut surat terkait reputasi sepihak lingkungan Ukraina di Donetsk dan Luhansk, mendakwa andaikan gabungan Rusia mengakhiri dengan cepat daya tahan Ukraina dan menuntaskan kekhawatiran Akbar pada laporan-laporan penyerahan, PBB tidak akan menanggapi teritori-teritori yang direbut menggunakan kekuatan militer, dan menyadarkan kewajiban semua Negara pada Pasal 2 Piagam PBB (Hartana 2021). Dalam konflik tersebut ada juga upaya penyelesaian secara diplomasi seperti Indonesia dan G20 Presiden Indonesia melakukan kunjungan kerja ke-kedua negara untuk melakukan mediasi, Turkey juga mempromosikan upaya diplomasi untuk mencapai resolusi damai yang berkelanjutan, Presiden Prancis juga melakukan kunjungan ke-kedua negara tersebut untuk mediasi, kunjungan Sekjen PBB kedua negara untuk mediasi, dan Liga Arab

mengumpulkan menteri luar negeri kedua negara (FARHAN 2024).

## 5. Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bergabungnya Ukraina ke dalam NATO telah menciptakan konflik dengan Rusia yang berdampak luas pada politik global dan pasar internasional. Konflik ini mempengaruhi politik internal, ekonomi, dan hukum di Ukraina dan Rusia, serta hubungan diplomatik global. Di Ukraina, terjadi polarisasi politik antara pendukung pro-NATO dan pro-Rusia, sementara di Rusia, kebebasan berpendapat dibatasi dan serangan siber meningkat. Dampak ekonomi mencakup isolasi internasional bagi Ukraina dan sanksi ekonomi bagi Rusia, termasuk penurunan harga minyak akibat boikot impor dari Amerika dan sekutunya. Defisit pangan juga terjadi akibat ketergantungan pada impor gandum dan minyak dari kedua negara. Berbagai negara dan organisasi internasional, seperti PBB, Indonesia, Turki, dan Prancis, telah berupaya meredakan konflik melalui diplomasi dan mediasi. Saran yang diberikan mencakup upaya diplomasi intensif, koordinasi global untuk mengurangi dampak ekonomi negatif, dan perlindungan hak asasi manusia serta prinsip hukum internasional. Dengan pendekatan holistik dan kerja sama antarnegara, diharapkan konflik ini dapat diselesaikan dengan damai dan memberikan stabilitas jangka panjang bagi kawasan dan dunia.

## Ucapan Terima Kasih

Dengan tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penyusunan artikel ini. Dukungan, informasi, dan wawasan yang diberikan sangat berharga dalam membantu kami memahami dan menguraikan kompleksitas konflik antara Ukraina dan Rusia serta dampaknya pada politik global dan ekonomi internasional. Penulis menghargai upaya dan kerja keras dalam menyediakan data yang akurat dan relevan, serta saran-saran yang konstruktif untuk mencapai solusi damai dan stabilitas jangka panjang. Terima kasih atas dedikasi yang diberikan dalam mempromosikan pemahaman yang lebih baik dan mendorong dialog yang konstruktif.

## Daftar Pustaka

Adham, M. Januar Ibnu. 2023. "Pengaruh Pemberitaan Digital Perang Rusia Dan Ukraina Terhadap Opini Publik Kewarganegaraan." *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 1 (2): 82–86.

- <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1239>.
- Agustina, Andreani Caroline Barus. 2023. "Investasi Safe Haven: Dampak Perang Rusia - Ukraina." *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* 7 (3): 2330–39. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1523>.
- Amal, Talabul, Ali Muhammad, Takdir Ali Mukti, and Moh Talabul Amal. 2022. "Intervensi Politik Dan Militer Rusia Terhadap Ukraina Sebagai Wujud Penerapan Strategi Deterrens." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8 (2): 262–73. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.21941>.
- Bakrie, Connie Rahakundini, Mariane Olivia Delanova, and Yanyan Mochamad Yani. 2022. "Pengaruh Perang Rusia Dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Caraka Prabhu* 6 (1): 65–86. <https://doi.org/10.36859/jcp.v6i1.1019>.
- Chandra, Kent Revelino, and I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. 2023. "Perang Rusia-Ukraina Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Rusia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12 (2): 402. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2023.v12i.02.p12>.
- Dewi Aisyah, and Arlina Permanasari. 2022. "TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi Kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA)." *TerAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM* 3 (2): 113–26. <https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15049>.
- FARHAN, MUHAMMAD. 2024. "Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Konflik Rusia Dan Ukraina Melalui Jalur Diplomasi Executive Summary," no. 1.
- Gunadi, Mega Chintia. 2014. "UPAYA UKRAINA MENGHADAPI RUSIA ATAS ANEKSASI SEMENANJUNG CRIMEA TAHUN 2014 Oleh: Mega Chintia Gunadi 1 Pembimbing," 1–16. <http://www.voaindonesia.com/content/Crimea->
- Hakim, A B, and M Sadiyin. 2022. "Pengaruh Perang Rusia-Ukraina Terhadap Stabilitas Hubungan Politik Indonesia Dan Rusia." *Journal of International Relations* 2 (1): 14–21.
- Hartana, I Komang Andi Antara Putra. 2021. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Ditinjau Dari Hukum Organisasi Internasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9 (1): 259–66.
- Latupeirissa, Chezia, Novriest Umbu, Walangara Nau, Roberto Octovianus, and Cornelis Seba. 2023. "Analisis Konflik Rusia Ukraina Dan Konflik Internal NATO Menggunakan Siklus Kausalitas." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3 (6): 9424–38.
- Nabilla, S, G Rahmi, P D Prawira, and ... 2023. "Dampak Perang Rusia-Ukraina Terhadap Ketersediaan BBM (Minyak Bumi) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah ...* 1 (4). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/286>.
- Nadia Maulidatul Qudsiyah, Pinastika Prajna Paramita, M Fahrudin Andriansyah. 2023. "PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARGA SIPIL YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA ANTARA RUSIA DAN UKRAINA." *DINAMIKA* 29 (01): 32.
- SYARONI, A, and A Nugroho. 2019. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Cyberattack Pada Konflik Rusia Dan Ukraina Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Novum: Jurnal Hukum*, no. lcc: 9. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/26507>.